

EVALUASI KINERJA SBY-JK DALAM MENGATASI KEMISKINAN

Oleh : Dewi Erowati

Abstract :

Poverty is a serious problem in every country, included Indonesia. Elected Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla (SBY-JK) as President and Vice President by directly, poverty had place as main priority national policy. For SBY-JK leadership, poor total add more 1,78% (39,05 million in 2006, before 35,10 million). Because poverty line move up 18,39% than before, beside that this is influence economy factor. Activity to cut down on poverty as same as before government except cash assistance and poor help insurance.

Keywords : poverty, poverty line

A. PENDAHULUAN

Sejak pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia diselenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2004. Dalam pemilu tersebut, disamping memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung juga memilih anggota legislatif. Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui 2 (dua) tahap yaitu 5 Juni 2004 (putaran I) yang diikuti oleh 5 (lima) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Kelima pasang calon tersebut adalah H. Wiranto – Ir. H. Salahuddin Wahid, Hj. Megawati Soekarnoputri – K.H. Akhmad Hasyim Muzadi, Prof. DR. H. Amin Rais – DR. Ir. H. Siswono Yudohusodo, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono – Drs. H.M. Jusuf Kalla, dan pasangan DR.H. Hamzah Haz – H.Agum Gumelar, M.Sc. Hasil dari putaran I yang berhak maju ke putaran II adalah pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri – K.H. Akhmad Hasyim Muzadi dan DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono – Drs.H. M. Jusuf Kalla. Pada putaran II yang diselenggarakan pada 20 September 2004 dimenangkan oleh pasangan Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono – H.M.Jusuf Kalla (yang terkenal dengan SBY-JK), yang dituangkan dalam Keputusan KPU No. 98/SK/KPU/2004 tertanggal 4 Oktober 2004. (Legislatif, 2004 : 9) Perolehan suara SBY-JK 60% dari total suara sekaligus memberikan harapan bagi 220 juta jiwa rakyat Indonesia terhadap berbagai pembaharuan yang tertumpu diatas pundak SBY-JK.

Sejak pelantikan SBY-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai sekarang, berarti kepemimpinan beliau sudah berjalan selama hampir 3 (tiga) tahun. Selama

ini pula sudah ada beberapa perubahan, walaupun tidak terlihat secara jelas. Visi SBY – JK adalah sebagai berikut:

- .. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
 - .. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
 - .. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan misinya adalah :
 - .. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
 - .. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
 - .. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
- Agenda dan program kerja SBY-JK pada waktu mencalonkan menjadi Presiden dan Wakil Peresiden meliputi 3 bidang utama yaitu :
- I. Pertahanan, Keamanan, Politik dan Sosial untuk Mewujudkan Indonesia yang lebih Aman dan Damai.
 - II. Keadilan, Hukum HAM dan Demokrasi untuk Mewujudkan Masyarakat yang lebih Adil dan Demokrasi.
 - III. Ekonomi dan Kesejahteraan untuk Mewujudkan Masyarakat yang lebih Sejahtera. (Kompas, 29 Mei 2004)
- Salah satu agenda dan program kerja SBY-JK yang menjadi prioritas utama bidang III dan termasuk salah satu misi adalah penghapusan kemiskinan. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis sejauhmana perkembangan penghapusan kemiskinan pada masa pemerintahan SBY-JK.

B. PEMBAHASAN

B.1 Definisi dan Dimensi Kemiskinan

Sama halnya dengan konsep pembangunan, kemiskinan juga merupakan sesuatu yang bersifat multidimensional, yang bisa ditinjau dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum memberikan definisi yang sesuai untuk artikel ini, penulis ingin menguraikan beberapa definisi kemiskinan. Kemiskinan menurut Edi Suharto memiliki beberapa ciri yaitu :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga.
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik dan mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil). (Edi Suharto, 2005:132)

Dengan menggunakan perspektif yang berbeda, kemiskinan dapat dibagi dalam beberapa dimensi yaitu:

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi telah melahirkan negara-negara maju sebagai pemenang dan negara-negara berkembang semakin terpinggirkan oleh adanya persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsiten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).

3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensi. Kemiskinan ini terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana lam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. (ibid, 132-133)

Ada 2 (dua) kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi yakni kemiskinan alamiah dan kemiskinan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 pengertian yaitu :

1. Kemiskinan absolut
Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.
2. Kemiskinan relatif
Kemiskinan relatif sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural
Miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. (<http://www.pemilihan.umum.go.id/publik/P2KP/Des/memahami99.htm>)

Sementara itu, dimensi kemiskinan menyangkut beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan : kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Kemiskinan menurut Dinas Sosial adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, yang biasa disebut dengan fakir miskin. Fakir miskin

adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Kemiskinan ditinjau dari aspek politik, dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada 3 (tiga) pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan akses terhadap kekuasaan ini yaitu :

- a. Bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat
- b. Bagaimana orang dapat turut serta dalam pembuatan keputusan penggunaan sumber daya yang tersedia,
- c. Bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dalam konteks politik, kemiskinan didefinisikan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial.

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Cultural poverty theory yang dikemukakan Oscar Lewis menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dan lain-lain. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam

memanfaatkan sumber daya. Menurut perspektif ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan ketidakmauan si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin untuk bekerja. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. ([http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=content/Express/RPJM2004-Jan05/view=Bab%2016%20\(kemiskinan\).pdf](http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=content/Express/RPJM2004-Jan05/view=Bab%2016%20(kemiskinan).pdf)) Dari berbagai uraian diatas, kemiskinan dalam artikel ini didefinisikan dari segi ekonomi yaitu sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan. Dengan kata lain, ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan dan pendidikan.

B.2 Perbandingan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Kepemimpinan SBY-JK

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1996 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah cukup tajam dari 34,01 juta jiwa menjadi 49,50 juta jiwa pada tahun 1998. Seiring perubahan waktu jumlah dan prosentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia 1996 – 2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Prosentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97
2006	14,29	24,76	39,05	13,36	21,90	17,75

Sumber : Berita Resmi Statistik No.47/IX/1 September 2006

Berdasarkan data diatas, maka pada periode 1999-2004 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 11,87 juta, yaitu dari 47,97 pada tahun 1999 menjadi 36,10 juta pada tahun 2004. Secara relatif juga terjadi penurunan prosentase penduduk miskin dari 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 16,66 % pada tahun 2004. Penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap juga terjadi pada tahun 2005 sebesar 1 juta yaitu tahun 2004 jumlah penduduk miskin adalah 36,10 juta menjadi 35,10 juta pada tahun 2005, dengan prosentase penurunan sebesar 0,69 %.

Sementara pada tahun 2006 justru terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,78 %. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 hanya 35,10 juta meningkat menjadi 39,05 juta. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah GK. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin berkorelasi dengan naik turunnya GK. Jadi, semakin tinggi GK, maka semakin banyak jumlah penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Besarnya Garis Kemiskinan (GK) pada tahun 2005 sebesar 18,39 % yaitu dari Rp 129.108,00 per kapita per bulan pada tahun 2005 menjadi Rp 152.847,00 pada tahun 2006. Komponen GK yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan, ternyata peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan). Pada tahun 2005 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,54 %, tetapi pada tahun 2006 peranannya meningkat sampai 74,99 %. Meningkatnya peranan GKM terhadap GK sebagian besar disebabkan oleh naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, di samping itu disebabkan juga oleh inflasi sebesar 17,95 % selama tahun 2005 – 2006. Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Oleh karena itu, kenaikan harga beras akan berpengaruh besar bagi penduduk miskin. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh besar terhadap GK adalah gula

pasir, minyak goreng, telur dan mie instant. Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan besar, di samping listrik, angkutan dan minyak tanah. (http://www.ypr.or.id/artikel/download/download_statistik_kemiskinan2005-06070307.pdf)

Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 sebesar 35,10 juta menjadi 39,05 juta di samping disebabkan oleh kenaikan GK, juga terjadi karena secara umum penduduk miskin dapat dibedakan menjadi 2 yaitu miskin kronis (*chronic poor*) dan miskin sementara (*transient poor*). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah GK dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat GK. Jika terjadi perubahan dalam ekonomi, kondisinya juga akan mengalami perubahan. Perbaikan di dalam ekonomi akan mempengaruhi kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara bisa meningkat. Dengan demikian, statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin.

Pergeseran posisi penduduk miskin tahun 2005 – 2006 dapat dianalisa dari distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 40% terendah. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dari kelompok penduduk 40 % terendah menunjukkan peningkatan selama tahun tersebut (2005-2006). Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Pergeseran Penduduk Miskin 2005 – 2006 (Prosen)

Kondisi 2005	Kondisi 2006				TOTAL
	Miskin	Hampir Miskin	Hampir Tidak Miskin	Tidak Miskin	
Miskin	56,51	19,37	17,66	6,45	100
Hampir Miskin	30,29	26,37	30,76	12,58	100
Hampir Tidak Miskin	11,82	16,22	41,00	30,96	100
Tidak Miskin	2,29	3,60	21,77	72,34	100
TOTAL	17,75	13,02	27,84	41,39	100

Sumber: http://www.ypr.or.id/artikel/download/download_statistikkemiskinan2005-06070307.pdf

Catatan :

Miskin : <GK (Garis Kemiskinan)

- **Hampir miskin : 1,00-1,25 GK**
- **Hampir Tidak Miskin : 1,25-1,50 GK**
- **Tidak Miskin : >1,50 GK**

Berdasarkan tabel diatas, telah terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin tahun 2005-2006, sekitar 56,51 % penduduk miskin pada tahun 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada tahun 2006, tetapi sisanya berpindah posisi menjadi hampir miskin (19,37 %), hampir tidak miskin (17,66 %) dan tidak miskin (6,45 %). Perubahan besar terjadi pada penduduk hampir miskin dan hampir tidak miskin. Sekitar 30,29 % penduduk hampir miskin di tahun 2005 jatuh menjadi miskin pada tahun 2006. Pada saat yang sama 11,82 % penduduk hampir tidak miskin tahun 2005 juga jatuh menjadi miskin pada tahun 2006, bahkan 2,29 % penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin tahun 2006. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin tahun 2006 sebesar 39,05 juta berasal dari penduduk miskin lama (19,8 juta), penduduk hampir miskin (9,9 juta), penduduk hampir tidak miskin (7,3 juta) dan penduduk tidak miskin (2,1 juta) yang terjatuh menjadi miskin. Dengan memperhatikan pergeseran posisi ini, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 terjadi karena adanya pergeseran penduduk yang penghasilannya berada tidak jauh dari GK. (http://www.ypr.or.id/artikel/download/download_statistik_kemiskinan2005-06070307.pdf) Sementara jumlah penduduk miskin sebelum SBY-JK atau tahun 1996 – 2004 berfluktuasi, tetapi GK pada posisi yang tetap, hal ini tentu saja mempermudah perhitungan penduduk miskin dan upaya mengatasinya, karena sejak masa Orde Lama bahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI sudah ada kebijakan untuk menghapuskan kemiskinan.

B.3 Kebijakan SBY-JK Dalam Mengatasi Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dengan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pembangunan tahunan. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengesahkan adanya Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan pada tahun 2000, di mana salah satu tujuannya adalah pemberantasan kemiskinan. Wujud dari MDGs adalah dengan membentuk Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan. Selain itu, sekitar 60 persen pemerintah kabupaten/kota telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan. (<http://www.undp.or.id/pubs/imdg/005/BI/TUJUAN%201.pdf>) Kegiatan yang telah dilakukan oleh SBY-JK dalam mengatasi kemiskinan yaitu:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Merupakan kompensasi BBM karena kebijakan pengurangan subsidi BBM yang selama ini banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk mengurangi subsidi tersebut. Dengan pengurangan subsidi BBM tersebut, maka harga BBM menjadi naik. Hal ini berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang sangat memberatkan bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, pemerintah memberikan BLT kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin sebesar Rp 100.000,00 per bulan yang diterima setiap 3 bulan sekali. Dengan adanya bantuan tersebut, setidaknya dapat meringankan beban penduduk miskin. Dalam implementasinya, pemberian BLT banyak yang tidak mengenai sasaran, hal ini terkait dengan persyaratan BLT yaitu harus mempunyai KTP. Menurut pengamatan penulis, di daerah Kebumen banyak sekali warga yang mampu tetapi mengaku atau membuat keterangan palsu supaya mendapat dana BLT. Anehnya, perangkat desa setempat justru melaporkan kalau warganya banyak yang tidak mampu. Hal ini terkait dengan budaya yaitu tidak mau bekerja keras, disamping itu banyak sekali warga yang tidak mempunyai rasa malu telah mendapat BLT yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Untuk itulah petugas terkait khususnya kecamatan atau kabupaten harus melakukan pengecekan langsung terhadap warga yang mendapat BLT. Yang perlu dievaluasi dari pemberian BLT disamping petugas harus melakukan investigasi secara langsung, juga pada waktu pencairan dana. Menurut pemberitaan di

berbagai media massa ada beberapa korban jiwa akibat berdesak-desakan dan antrian yang terlalu lama. Dana BLT menurut pengamatan penulis belum memberikan dampak yang berarti karena dana tersebut diberikan secara cuma-cuma dan penduduk miskin menggunakannya tidak sebagai modal tetapi langsung habis karena dikonsumsi.

2. P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)

Sebetulnya kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, karena P2KP lahir tahun 1999. Ada kecenderungan bahwa kemiskinan lebih banyak ditemui di wilayah perkotaan seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan krisis ekonomi. Kemiskinan tetap sebagai suatu kondisi sosial yang umumnya invisible dan belum dipahami sepenuhnya oleh para pengambil keputusan. Ini pula yang menjadi motif utama pelaksanaan P2KP. Kemiskinan sebagai masalah nasional, tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi. Proyek P2KP menekankan pada pendekatan komunitas dan bertumpu pada pengembangan manusia. (<http://www.pu.go.id/publik/P2KP/Okt/Struktur00.htm>) Hal ini terlihat jelas dalam latar belakang proyek yang menegaskan bahwa proyek P2KP dirancang secara khusus dengan pengertian bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan dengan lebih memberdayakan komunitas itu sendiri khususnya komunitas di tingkat kelurahan, dengan menyediakan sumber daya yang tepat dan menekankan bahwa pengambilan keputusan maupun tanggung jawab berada di tangan komunitas sendiri.

3. Menyediakan lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin

Terjadi kesenjangan fiskal antar daerah di Indonesia, akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga pemerintah mengalokasikan dana yang berbeda antar daerah.

4. Menyediakan askeskin

Merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada masa pemerintahan SBY-JK, diharapkan dengan adanya askeskin, penduduk miskin bisa

mendapatkan pelayanan gratis sehingga kesehatannya terjamin.

Sementara kegiatan yang lainnya dalam mengatasi masalah kemiskinan sama dengan pemerintahan sebelumnya, antara lain berupa kegiatan peningkatan ketahanan pangan, upaya kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang memberi manfaat pada penduduk miskin, dan pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin.

C. PENUTUP

Upaya penanggulangan kemiskinan telah menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan nasional sehingga diharapkan dapat menurunkan prosentase penduduk miskin menjadi 8,2 % pada tahun 2009. Berbagai kegiatan telah dilakukan, tetapi implementasi di lapangan banyak yang tidak mengenai sasaran khususnya BLT dan pelayanan Askeskin. Oleh karena itu, setiap kegiatan perlu dievaluasi kembali agar Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berikutnya menghasilkan suatu program yang tepat pada sasaran sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Daftar Pustaka

- A. Buku
 - Suharto, Edi. (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Adistama.
- B. Media Massa dan Majalah
 - Visi Misi dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dalam *Kompas*, 29 Mei 2004
 - Presiden Baru Harapan Baru, Laporan Utama dalam *Legislatif*, Edisi XX, 15 Oktober 2004, hal.9
- C. Web-site
 - <http://www.pu.go.id/publik/P2KP/Okt/Struktur00.htm> diakses 7 Mei 2007
 - <http://www.ypr.or.id/artikel/download/download-statistik-kemiskinan2005-06070307.pdf> diakses 8 Mei 2007
 - <http://www.pemilihan.umum.go.id/publik/P2KP/Des/memahami99.htm> diakses 9 Mei 2007
 - [http://www.bappenas.go.id/index.php?module=FileManager&func=download&pathext=ContentExpress/RPJM2004-Jan05/&view=Bab%2016%20\(kemiskinan\).pdf](http://www.bappenas.go.id/index.php?module=FileManager&func=download&pathext=ContentExpress/RPJM2004-Jan05/&view=Bab%2016%20(kemiskinan).pdf) diakses 10 Mei 2007
 - <http://www.undp.or.id/pubs/imdg2005/BI?TUJUAN%201.pdf> diakses 10 Mei 2007